

UPAYA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA MELALUI ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PASIFIC (AOIP)

Oleh : Ayunda Wimanora

email: ayunda.wimanora0199@student.unri.ac.id

Pembimbing : Hendrini Renolafitri, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia's efforts in realizing the vision of the World Maritime Fulcrum are considered successful in terms of the various activities and cooperation carried out by Indonesia through AOIP. Based on this success, this research wants to analyze how Indonesia's efforts are in realizing the vision of the World Maritime Axis through the ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP).

To answer research questions, this study uses 5 component indicators in the theory of Regionalism by Welter S. Jones which are guided by: 1) Maximizing economic potential; 2) Maximizing political potential; 3) Settlement of regional conflicts.

The results of this study prove that the success of Indonesia's efforts in realizing the vision of the World Maritime Axis through AOIP is determined by 3 components of regionalism theory, namely: 1) Maximizing economic potential by giving priority to infrastructure development and maritime connectivity with ASEAN dialogue partner countries, 2) Maximizing political potential, namely efforts through Maritime Diplomacy in overcoming issues of maritime shipping and technical cooperation in marine science through collaboration between the public and the private sector in the region 3) Regional Conflict Resolution, namely through offering increased cooperation in the maritime field and efforts to deal with sources of conflict, such as theft fish, ownership violations, territorial disputes, piracy, and marine pollution with an emphasis that the sea must be free from various nations and not separate; Building maritime strength as a responsibility to maintain shipping safety and Maritime Security.

Keywords: AOIP, World Maritime Axis, Maritime Diplomacy

PENDAHULUAN

Secara geografis, wilayah Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia kemaritiman. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih banyak air daripada daratan, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau dan potensi lautan yang luas. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan ekonomi maritim yang menjadi sumber kemakmuran bagi rakyatnya. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki berbagai potensi kelautan, tidak hanya di bidang bioteknologi, wisata bahari, air laut dan mineral laut, tetapi juga di bidang perkapalan, industri pertahanan, dan industri maritim global.¹

Selain potensi sumber daya alam tersebut, Indonesia juga diuntungkan secara politik dan ekonomi dari letak teritorialnya yang strategis. Indonesia terletak di garis khatulistiwa antara benua Asia dan Australia dan menghubungkan langsung perekonomian negara-negara maju. Selain itu, Indonesia yang diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Indonesia sebagai kawasan yang menghubungkan negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Selat-selat strategis lalu lintas maritim global juga berada di perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar.

Posisi geopolitik dan geostrategi memberikan peluang bagi Indonesia tidak hanya sebagai jalur ekonomi global, tetapi juga sebagai jalur keamanan maritim internasional, sekaligus memberikan keuntungan bagi Indonesia dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor maritim. Ekonomi maritim (lautan) akan digunakan sebagai dasar untuk

membentuk pembangunan ekonomi nasional melalui gagasan poros maritim global yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi kelautan untuk menciptakan kemakmuran. Secara lebih spesifik, gagasan Poros Maritim merupakan upaya pemerintah Jokowi untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antar pulau di Indonesia. Tujuan akhir dari konektivitas ini adalah pemerataan pembangunan ekonomi dan terwujudnya keamanan maritim di Indonesia. Gagasan poros maritim Jokowi mencakup dua elemen mendasar pembangunan yaitu sebagai doktrin dan sebagai strategi pembangunan nasional. Pandangan yang lebih luas ini juga mencerminkan optimisme baru tentang arah politik Indonesia ke depan.

Namun, pengembangan sektor maritim negara masih menghadapi beberapa kendala. Untuk menjadi negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah lautnya, tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai basis pengembangan kemampuan militer dan pertahanannya. Indonesia menghadapi berbagai persoalan ancaman keamanan di perairan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik) yang beberapa di antaranya merupakan persimpangan maritim dunia, membuat Indonesia tidak mampu mengatasi masalah keamanan regional terkait pelayaran. Artinya, selain menjamin keamanan maritim di berbagai perairannya, Indonesia juga harus memperhatikan masalah keamanan di ranah maritim khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Sengketa perbatasan laut yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara damai antara banyak negara di kawasan menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu contohnya adalah sengketa wilayah di Laut Natuna Utara yang beberapa tahun

¹ Putri, S. R. K., Octavian, A., & Aritonang, S., 2019, *Implementasi kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Manajemen Pertahanan*, Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan, 4(1)

terakhir kembali memanas antara beberapa negara anggota ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei) dengan Tiongkok. Sekalipun Indonesia bukan bagian dari negara yang disengketakan, Indonesia harus ikut serta mencari solusi damai atas masalah tersebut.²

Selain itu juga perlu diperhatikan adalah ancaman non-tradisional, terutama yang ditimbulkan oleh berbagai kejahatan transnasional seperti pembajakan, perompakan dan urusan maritim yang secara langsung mengancam reputasi dan wilayah nasional. Perairan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, memiliki kepentingan dan strategi yang cukup besar untuk menghubungkan Asia dengan Eropa dan Timur Tengah. Peningkatan pelayaran internasional, khususnya kapal niaga internasional dan kapal tanker minyak, yang beroperasi di perairan teritorial Asia Tenggara dapat menarik perhatian kelompok dan entitas tertentu yang berniat melakukan pembajakan atau *piracy*.

Perairan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar memerlukan sikap dan doktrin pertahanan maritim yang disesuaikan dengan karakter unik yang membedakan dari doktrin pertahanan maritim negara lain. Bagi Indonesia, dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia (PMD) dibutuhkan aspek pendukung pertahanan laut seperti kapal-kapal patroli dan juga infrastruktur yang berkaitan dalam aspek pertahanan laut.

Melihat berbagai persoalan yang dihadapi dunia kemariman Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, diperlukan adanya 'Re-Konstruksi' terhadap perencanaan, pengelolaan serta pengamanan dan pembangunan domain maritim di Indonesia. Untuk mewujudkan rekonstruksi pengelolaan kemariman Indonesia, pemerintah perlu melakukan terobosan pada dua tingkat, yakni

nasional dan regional. Indonesia perlu memperkuat kerjasama keamanan maritim dalam hal pengelolaan sumber daya kemariman,

Indonesia sebagai *middle power country* tentunya masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya anggaran maupun manusia. Hal ini sudah sepatutnya untuk Indonesia kembangkan kerjasama yang hangat dan strategi dengan negara lain di kawasan dalam mempererat hubungan, menjaga keamanan dan juga untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Sebagai langkah strategi dalam merespons fenomena tersebut, Indonesia berusaha mengembangkan dan menginisiasi konsep *Indonesia's Perspective for an ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region* melalui ASEAN sebagai bagian upaya nasional dalam mengatasi isu keamanan maritim di kawasan, khususnya Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

KERANGKA TEORI

Penulis menggunakan perspektif Liberalisme. Pandangan liberalisme lebih menekankan kepada pemikiran yang positif dan optimis yang pada dasarnya ada pada diri manusia, tidak suka berkonflik dan mau bekerjasama serta memakai rasionalitas serta hal-hal yang masuk akal dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi. Sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan adanya suatu kondisi dimana kedua belah pihak mendapati kejanggalan dalam penyelesaiannya. Pandangan liberalis mengedepankan interdependensi dan kerjasama.

Teori yang penulis gunakan ialah regionalisme. Menurut Mansbaach, region atau kawasan dipahami sebagai pengelompokan regional yang diidentifikasi dari faktor kedekatan geografis, kebudayaan, perdagangan dan interdependensi ekonomi saling

² ibid

menguntungkan, komunikasi dan keikutsertaan dalam organisasi internasional. untuk mengukur tingkat kematangan suatu kerja sama regional menurut Welter S. Jones, sedikitnya ada 7 tahapan yang dapat diukur, yakni : (1) Asimilasi sosial; (2) Kesamaan nilai; (3) Keuntungan bersama; (4) Kedekatan hubungan di masa lampau; (5) Pentingnya integrasi itu sendiri; (6) Biaya relatif lebih rendah; (7) Pengaruh-pengaruh eksternal.

Untuk mencapai tingkat kematangan tersebut harus dicapai faktor-faktor berikut terlebih dahulu :

1. Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi
2. Dalam upaya memaksimalkan potensi politik
3. Dalam upaya penyelesaian konflik regional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis terkait pola dan mekanisme yang digunakan dalam kerjasama Asean Outlook on The Indo-Pacific (AOIP). Penulis memaparkan tinjauan umum kerjasama AOIP dan Upaya Indonesia dalam mewujudkan visi Poros Maritim.

Gambaran Umum Asean Outlook On the Indo-Pacific (AOIP)

AOIP memuat visi yang jelas mengenai kawasan Indo-Pasifik, yaitu sebagai suatu kawasan kerja sama bukan rivalitas, sebagai kawasan untuk pembangunan dan kemakmuran bersama, menekankan perspektif maritim dalam kerja sama kawasan, serta memandang kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai satu kawasan Indo-Pasifik yang terintegrasi dan terinterkoneksi. AOIP memberikan prioritas pada penguatan tatanan, mekanisme dan institusi kerja sama kawasan. Bersama dengan negara ASEAN dan negara serta organisasi lain di kawasan Indo-Pasifik untuk menangani isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. AOIP memiliki visi dan misi sebagai berikut:

(1) menawarkan pandangan untuk memandu kerja sama di kawasan;

(2) membantu mempromosikan lingkungan yang memungkinkan untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan demikian memperkuat kepercayaan

(3) meningkatkan proses pembangunan Komunitas ASEAN dan memperkuat lebih lanjut mekanisme yang dipimpin ASEAN, seperti EAS;

(4) menerapkan dan menjajaki bidang kerja sama prioritas ASEAN lainnya, termasuk kerja sama maritim, konektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan bidang kerja sama ekonomi

Adapun cakupan bidang kerja sama AOIP adalah:

1. Kerjasama Maritim

Terkait dengan penyelesaian sengketa secara damai; mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, dan kebebasan navigasi dan penerbangan; menangani kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang atau obat-obatan terlarang, pembajakan laut, perampokan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di laut, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, mengatasi pencemaran laut, kenaikan permukaan laut, sampah laut, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut

2. Kerjasama Konektivitas

Kerja sama dalam memperkuat MPAC 2025 yang ada dan mempromosikan kemakmuran dan pembangunan di kawasan Indo-Pasifik, pembangunan kemitraan publik-swasta (KPS) regional untuk memobilisasi sumber daya untuk proyek konektivitas, termasuk proyek infrastruktur di Indo wilayah Pasifik, Menggali potensi sinergi dengan kerangka kerja sub-regional

3. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Mencakup berkontribusi dalam pencapaian SDGs termasuk melalui pemanfaatan digital ekonomi, Meningkatkan komplementaritas dan

menyelaraskan agenda pembangunan regional dengan SDGs, seperti Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030. dan Mempromosikan kerjasama dengan Pusat Studi dan Dialog Pembangunan Berkelanjutan ASEAN dan lembaga-lembaga terkait lainnya di kawasan.

4. Kerjasama Dalam Bidang Ekonomi dan Kemungkinan Kerjasama Lainnya

Kerjasama ini mencakup Kerjasama Selatan-Selatan (termasuk Kerjasama Selatan Segitiga Fasilitasi Perdagangan dan Infrastruktur dan Layanan Logistik.

DOKTRIN POROS MARITIM INDONESIA

Gagasan tentang PMD diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Beberapa bulan setelah gagasan PMD dideklarasikan oleh Jokowi secara domestik setelah pelantikannya sebagai presiden, Indonesia kemudian mendeklarasikan doktrin PMD ini pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *East Asia Summit* ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014. Pada rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut, Indonesia juga mengajak negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang kemaritiman.³

Sehubungan dengan PMD pula, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia yang secara langsung berkepentingan untuk berperan menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (Indo-Pasifik) sehingga kawasan tersebut tetap aman dan damai bagi perdagangan dunia, bukan menjadi ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan persaingan

supremasi maritim.⁴ Ini artinya konsep kerjasama Indo-Pasifik yang digagas Indonesia dan diterima sebagai outlook ASEAN sangat selaras dengan PMD.

Hal ini juga dikonfirmasi Menlu RI, Retno Marsudi pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan *High Level Dialogue on IndoPacific Cooperation* di Jakarta pada 20 Maret 2019. Pada kesempatan tersebut Menlu Retno menyampaikan bahwa kerangka kerjasama Indo-Pasifik yang inklusif dan transparan akan selaras dengan visi Indonesia sebagai PMD.

PMD digagas untuk menangani masalah-masalah dan isu-isu terkait perairan Indonesia. Dengan adanya PMD, pemerintah Indonesia pada akhirnya dituntut untuk lebih memperhatikan wilayah perairannya yang kemudian membuat pemerintah Indonesia memperkuat unsur-unsur kemaritimannya. Diplomasi maritim pada era pemerintahan Jokowi diawali dengan adanya gagasan mengenai Poros Maritim Dunia (PMD). Perlu dipahami bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam gagasan ini, yakni: poros maritim dan dunia.

Dalam kaitannya dengan AOIP, Indonesia melihat peluang yang ada di kawasan ASEAN sebagai ruang yang dapat membantu Indonesia dalam memperluas Keberhasilan cakupan Indonesia kerja samanya. membawa isu maritim dalam agenda ASEAN juga merupakan langkah awal yang membantu Indonesia membuka jalan demi mencapai PMD. Isu maritim bagi Indonesia saat ini merupakan ancaman yang memberikan dampak pada aspek penting terkait permasalahan yang mengancam ekonomi, pertahanan dan keamanan Indonesia seperti permasalahan perbatasan, isu perompak dan *illegal fishing*, serta perubahan geopolitik yang mengancam sentralitas kawasan menjadi skala utama

³ Kuncoro, F. (2018). Membangun Kekuatan Nasional Dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 175-190.

⁴ Marsetio, Seapower. (Jakarta: Universitas Pertahanan Press, 2018), hlm. 17

dalam pemetaan kepentingan Indonesia yang digagas sebagai PMD.

Terdapat lima pilar utama dalam mewujudkan gagasan Poros Maritim Dunia, yaitu: pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia dengan cara berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kedua, ekonomi maritim dengan cara membangun kelautan pagan. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

UPAYA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA MELALUI ASEAN OULOOK ON THE INDO-PASIFIC (AOIP)

Upaya Indonesia melalui AOIP dalam Penyelesaian Sengketa serta Keselamatan dan Keamanan Maritim

1. Kerjasama Maritim melalui Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation on the Indo-Pacific: Nexus antara GMF (Indonesia) dan SAGAR

terkait illegal fishing antara Indonesia dengan India di laut Andaman, yaitu Pulau Rondo (Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pulau Nicobar (India). Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Indonesia memanfaatkan AOIP untuk dapat melakukan kerjasama keamanan maritim dengan India melalui antar Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI dan India

2. Indonesia juga berhasil membentuk ASEAN Coast Guard Forum

AOIP juga menyematani kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan isu laut

natuna utara dengan melakukan peningkatan keamanan maritim melalui pembentukan ASEAN Coast Guard Forum dibawah mekanisme ARF. Forum ini dibentuk setelah diadopsinya ARF Statement to Promote Peace, Stability and Prosperity in the Region Through Preventive Measure pada pertemuan ARF di Phnom Penh, tanggal 5 Agustus 2022 dengan mekanisme yang dijalankan yaitu melalui information sharing.

3. Kerja Sama Trilateral Coast Guard Indonesia, Malaysia dan Philipina.

Dalam menghadapi keamanan di laut Sulu, pemerintah Indonesia-Malaysia-Philipina melakukan pertemuan Trilateral Coast Guard yang dihadiri oleh Philippine Coast Guard (PCG) dan Agensi Penguat kuasa Maritim Malaysia (APMM) di Manila Filipina, Rabu 29 Juni 2022. Ketiganya sepakat untuk meningkatkan kapasitas kerjasama melalui penentuan Point Of Contact dalam pertukaran informasi, merencanakan *Coast Guard Coordinated* patroli dan pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas personel.

Upaya Indonesia melalui AOIP dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan, serta Konektivitas Maritim

Dalam mewujudkan PMD, Indonesia berkepentingan untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan sebagai perluasan pasar dan meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya maritim.

1. Kerja Sama dalam Agenda Ekonomi Biru

Melalui AOIP, Indonesia meningkatkan kerja sama melalui agenda ekonomi biru untuk mengurangi kerugian dari ancaman maritim. Potensi pasar di negara-negara anggota IORA masih belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan minimnya infrastruktur dan pengawasan yang memadai di beberapa negara anggota, bahkan pemerintah Indonesia sendiri. Sehingga pengembangan ekonomi

kelautan yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi yang seharusnya didapatkan.

Indonesia mendukung pengembangan ekonomi biru di IORA sebagai solusi pembangunan ekonomi di kawasan. Dengan adanya pengelolaan laut berkelanjutan melalui implementasi ekonomi biru, maka pertumbuhan ekonomi berbasis samudera dan laut dapat menjawab tantangan, ancaman, dan kesempatan di Samudera Hindia. Kepentingan tata dunia bagi Indonesia juga merupakan isu major. Hal ini berkenaan dengan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Melalui visi PMD, Presiden Jokowi menyampaikan pesan politik sekaligus pesan ekonomi bahwa bagi Indonesia, kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik memiliki peran penting bagi stabilitas keamanan dan ekonomi global. konferensi tersebut menghasilkan dua dokumen penting sebagai pondasi pengembangan isu ekonomi biru yaitu *Jakarta Concord* dan Rencana Aksi IORA 2017-2021 berisi rencana konkret dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Di dalam dokumen *Jakarta Concord* tersebut secara khusus menyatakan bahwa terkait pengembangan isu lintas sektor, negara-negara anggota diharapkan mampu mengembangkan potensi kelautan dengan mempromosikan ekonomi biru sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja dan pendidikan, berdasarkan pada pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan berbasis bukti. Rencana Aksi IORA 2017-2021 tersebut terdiri atas beberapa inisiatif untuk memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi biru di kawasan.

2. Kerja Sama Shared Vision of India - Indonesia Maritime Cooperation in the Indo Pacific

Melalui kerja sama infrastruktur dikembangkan melalui kerja sama Pelabuhan Sabang dan Port Blair yang

kedepannya diharapkan dapat menjadi Sister Port yang akan menguntungkan kedua negara secara ekonomi.

3. Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Corridor (IMT-GT)

melalui pembangunan rayek Roro antar negara dari Dumai, Riau ke Malaka, Malaysia. Rute ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik kedua negara dan saling menguntungkan terutama untuk memperlancar arus barang dan orang.

4. Kerja Sama Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC)

melalui proyek pembangunan Kuala Tanjung International Hub Port and Industrial Estate Phase II/Indonesia, Expansion of Hang Nadim International Airport/Indonesia, dan Development of Kijing Port/Indonesia.

Upaya Indonesia melalui AOIP dalam Mengatasi Pencemaran Laut

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN adalah terkait dengan pencemaran laut salah satunya sampah plastik di laut. Pada tahun 2019, masalah sampah laut sebagai masalah lintas batas atau “*transboundary issue*” menjadi sorotan ketika pertemuan menteri ASEAN di Bangkok, Thailand, yang dihadiri oleh delegasi dari sepuluh anggota ASEAN.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut mendorong agar negara-negara menyusun rencana aksi, dalam tingkat nasional dan regional, untuk mengatasi masalah sampah lautan. Akhirnya, negara-negara anggota ASEAN meluncurkan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* atau Kerangka Kerja Atasi Sampah Laut sebagai langkah yang optimis di masa depan. Pada tingkat nasional, beberapa negara telah menyusun rencana mereka sendiri untuk mengurangi sampah plastik di daratan. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk mengelola sampah di dalam wilayah mereka.

Proyek Regional yang tentang peningkatan kapasitas lokal untuk proyek pengurangan polusi plastic di Kawasan ASEAN (ASEAN), dimulai pada tahun 2019. Negara-negara anggota ASEAN sendiri telah mengembangkan strategi kebijakan nasional dan langkah-langkah rencana aksi nasional untuk mengatasi sampah laut dan sampah plastik, yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 pada Juni 2019 melalui Deklarasi Bangkok tentang Penghapusan Sampah Laut di Kawasan ASEAN dan Kerangka Kerja ASEAN untuk Aksi Sampah Laut. Upaya ini menunjukkan tindakan praktis ASEAN dalam perlindungan lingkungan. Sebagai tindak lanjut, rencana aksi regional ASEAN untuk memerangi sampah laut dikembangkan mulai dari oktober 2019 hingga juli 2020 melalui konsultasi ekstensif dengan para ahli pemangku kebijakan kepentingan terkait melalui Kebijakan ASEAN Marine Debris.

Upaya Indonesia melalui AOIP dalam Kerjasama teknis dalam kerjasama ilmu kelautan; penelitian dan Pengembangan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, pengelolaan laut

Pemerintah Indonesia melalui Kemlu telah melaksanakan upaya untuk menggunakan AOIP sebagai wadah dari diplomasi maritim. Joko Widodo sendiri juga telah mengatakan bahwa Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah lautan masa depan Indonesia, sehingga berkomitmen akan terus meningkatkan diplomasi di wilayah ini.

Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan-perikanan yang adaptif terhadap kondisi global. Sebagai langkah konkrit, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta. pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan

ASEAN, dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Bahkan, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama negara-negara Asia Tenggara mengembangkan konsep *fisheries refugia* (refugia perikanan) untuk mendorong tata kelola perikanan berkelanjutan. Konsep ini juga diharapkan dapat mendukung implementasi penangkapan ikan terukur di Indonesia khususnya pada zona pemijahan (*spawning ground*) dan asuhan (*nursery ground*). Perkembangan implementasi *fisheries refugia* di Indonesia disampaikan Delegasi Indonesia pada Forum The 6th Regional Scientific and Technical Committee (RSTC) Meeting for the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)/United Nations Environment Program (UNEP)/Global Environment Facility (GEF) Project on Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand (Fisheries Refugia), 4-6 Juli 2022, di Samut Prakan, Thailand.

Sejak 2019 Indonesia menjadi salah satu negara yang terpilih untuk menjadi *pilot project fisheries refugia* bersama lima negara ASEAN lainnya, yaitu Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dalam pertemuan RSTC keenam ini, selain dilaporkan perkembangan implementasi *fisheries refugia* di masing-masing negara, juga dibahas dan didiskusikan terkait dengan tantangan dan *best practice* alat dan metode penangkapan, rencana pemetaan *fisheries refugia* dalam Google Maps, dan aspek kesetaraan gender dalam partisipasinya di kegiatan yang

berhubungan dengan fisheries refugia. Setelah membahas capaian project setiap negara, pertemuan RSTC keenam diisi dengan *brainstorming* untuk percepatan penyelesaian project di setiap negara, presentasi progress kegiatan dan pembahasan pembiayaan serta mekanisme penyelesaian proyek.

PENUTUP

Upaya Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia melalui ASEAN Outlook On the Indo-Pacific dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia melalui AOIP yang dijabarkan kedalam 3 kategori komponen upaya sesuai dengan teori Regionalisme yang menjadi alat analisis didalam penelitian ini yaitu oleh Welter S. Jones, yaitu: pertama, Memaksimalkan potensi ekonomi yaitu dengan memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna. 2020. "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific". *Jurnal International Affairs* 96, no. 1
- A'raf, Al. 2015. "Dinamika Keamanan Nasional" *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1
- Bahtiar, Harry. 2016. *Kerjasama Ekonomi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Industri Di Indonesia*. Universitas Pasundan
- F, Kuncoro. (2018). Membangun Kekuatan Nasional Dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 175-190.
- M Yanyan M. Yani dan Ian Montratama. 2018."Indonesia Sebagai Poros konektivitas maritim berfungsi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar kehidupan dalam sub-regional terutama Indonesia.
- Kedua, Memaksimalkan potensi politik yaitu upaya dalam mengatasi isu penemuan laut dan kerja sama teknis dalam ilmu kelautan melalui Kolaborasi antara publik dengan swasta di kawasan.
- Ketiga, Penyelesaian Konflik Regional yaitu penawaran peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kepemilikan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus bebas dari berbagai bangsa dan bukan memisahkan; Membangun kekuatan maritim sebagai tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan Keamanan Maritim.
- Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik*" *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. No. 2 25-52
- Nurmawati Ely, Chandra Purnama, dan Wawan Budi Darmawan, 2022. "Peran ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Kawasan Indo-Pasifik". *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6. no. 1
- I. N. Putra., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *JOURNAL ASRO*, 6, 1-22.
- Octavian Putri, S. R. K., & Aritonang, S. (2019). Implementasi kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Manajemen Pertahanan. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 4(1).

- Olivia, Yessi. 2013. "Level Analisa Sistem dan Teori Hubungan Internasional". Jurnal Transnasional. Vol.5. No.1.1. Pekanbaru
- Pangestu, Langgeng Gilang, Rizky Hikmawan, dan Laode Muhammad Fathun, 2020, "Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik". PhD diss, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
- P.D, Yakti., & Susanto, J. (2017). *Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi?.* *Global Strategis*, 11(2), 108-125.
- P, M. H. Gilang (2017). *Peran Asean Defence Ministers Meeting Plus (Admm) Plus Sebagai Forum Diplomasi Pertahanan Di Kawasan Asia* (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran" Yogyakarta).
- Saputra, Pradipta Nindyan, dan Arfin Sudirman. 2020. "Pengembangan Konsep Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN". *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 2
- Trahasdie, Senno Ariga. 2019. "Kerjasama Pt. Pal Indonesia (Persero) Dngandamen Schelde Naval Shipbuilding belanda dalam Bidang Pertahanan Untuk modernisasi alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia (2012-2017)". Universitas Komputer Indonesia Bandung
- Holsti, K. J dan Wawan Juanda. "Politik Internasional suatu Kerangka Analisis". (Bandung: Binacipta 1992)
- Holsti, K. J. "Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis". Jilid II.
- Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga 1998)
- Ikbar, Yanuar. "Metodologi & Teori Hubungan Internasional". (Bandung: PT Reflika Aditama 2014)
- Mas'oed, Mohtar. "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi". (Jakarta: LP3ES 1990)
- S, Nuraeni. Deasy Silvy, Arfin Sudirma. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional.* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur)
- Usman, Nurdin Usman. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum". (Grasindo, Jakarta, 2002)
- ASEAN, "ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC FINAL" diakses dari <https://asean.org/speechandstatement/asean-outlook-on-the-indo-pacific/>, pada tanggal 3 oktober
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2018. *Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing*, diakses dari <https://news.kkp.go.id/index.php/hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing/>
- Kementerian Luar Negeri. 2015. *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman-list-lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean>
- Kementerian Luar Negeri. 2019. *ASEAN Outlook on The Indo-Pacific Diperkenalkan Kepada Kanada*. diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/821/view/asean-outlook-on-indo-pacific-diperkenalkan-kepada-kanada>

Kementerian Luar Negeri. 2019. *Connecting Connectivity in the Indo-Pacific: The Indian Ocean and Rim Chapter*. diakses dari <https://kemlu.go.id/download/L3Np>

<https://www.iisau.org/2020/04/28/regionalisme/>

Organisasi IISAU. 2020. *Regionalisme*. diakses dari